

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Selasa, 30 Oktober 2018**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 30 Oktober 2018	JSMR Tambah 5 Ruas Sebelum Akhir 2018	Direktur Utama PT Jasa Marga (persero) Tbk. (JSMR) Desi Arryani mengatakan bahwa empat dari lima ruas tol tersebut tengah dalam pengerjaan konstruksi tahap akhir.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 30 Oktober 2018	14 PDAM Terapkan Manajemen Aset	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum memfasilitasi penerapan manajemen asset untuk 14 perusahaan daerah air minum guna menggenjot kinerja mereka.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 30 Oktober 2018	WIKA dan WSKT Menangi Lelang	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dan PT Waskita Karya Tbk. Menjadi pemenang lelang konstruksi proyek bendungan di Jawa Tengah dengan total nilai harga penawaran yang diajukan mencapai Rp 1,82 Triliun.
4	Kompas (Halaman, 13)	Selasa, 30 Oktober 2018	Penghapusan Tarif Perlu Upaya Lanjutan	Penghapusan tarif melintas Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dinilai perlu diikuti kebijakan yang menyeluruh agar bisa mendorong perekonomian di Madura
5	Media Indonesia (Halaman, 16)	Selasa, 30 Oktober 2018	Bangunan Mesti Tahan Bencana	Kondisi geografis Indonesia yang dilintasi sejumlah sesar aktif dan memiliki banyak gunung berapi aktif menjadikan aspek ketahanan bangunan sebagai salah satu syarat membangun property.
6	Media Indonesia (Halaman, 16)	Selasa, 30 Oktober 2018	Berita Foto	Perumahan Khusus Nelayan

Judul	JSMR Tambah 5 Ruas Sebelum Akhir 2018	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Direktur Utama PT Jasa Marga (persero) Tbk. (JSMR) Desi Arryani mengatakan bahwa empat dari lima ruas tol tersebut tengah dalam pengerjaan konstruksi tahap akhir.		

# JSMR Tambah 5 Ruas Sebelum Akhir 2018

JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memastikan bahwa lima ruas tol yang menjadi bagian Trans-Jawa dapat beroperasi sebelum akhir 2018.

Inna Agustine  
inna.agustine@bisnis.com

Direktur Utama PT Jasa Marga (persero) Tbk. (JSMR) Desi Arryani mengatakan bahwa empat dari lima ruas tol tersebut tengah dalam pengerjaan konstruksi tahap akhir.

Satu ruas di antaranya yakni Sragen—Ngawi sepanjang 51 kilometer bagian dari jalan tol Solo—Ngawi bahkan telah mengantongi sertifikat laik operasi (SLO) dan siap diresmikan.

"Sudah dilakukan ULO [uji laik operasi], sudah ada SLO-nya tinggal menunggu diresmikan sehingga bisa langsung beroperasi," kata Desi kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Sementara itu, empat ruas tol lainnya yang tengah tahap penyelesaian konstruksi dan dapat beroperasi sebelum tahun berganti yakni Batang—Semarang 75 km, Salatiga—Kartasura 35 km (bagian Semarang—Solo), Ngawi—Kertosono 37 km (bagian Ngawi—Wilangan), dan Gempol—Pasuruan seksi 3 sepanjang 14 km.

Desi mengatakan bahwa pengoperasian kelima ruas tersebut belum dikenakan tarif karena harus dilakukan sosialisasi tarif terlebih dahulu.

"Jadi, ini diresmikan semua tahun ini, tetapi mungkin tarifnya awal tahun depan. Misalnya, tanggal 1 atau 2 Januari karena sebelum menarik tarif kami harus membuka gratis dulu tarifnya minimal 7 hari," tuturnya.

Selain lima ruas tersebut, menurutnya, pada akhir tahun ini bagian ruas tol Surabaya—Gempol yakni relokasi Porong—Kejaparan juga akan rampung.

Sejak Januari 2015 hingga menjelang akhir Oktober 2018, JSMR telah mengoperasikan tambahan panjang 107 km. Secara total, jumlah konsesi yang dimiliki JSMR yang sudah beroperasi mencapai 747 km.

Sampai akhir 2019, Desi mengemukakan bahwa perusahaan menargetkan dapat mengoperasikan 1.260 km dari total panjang konsesi yang dimiliki saat ini 1.527 km.

JSMR sampai saat ini masih menguasai perusahaan jalan tol dengan pangsa pasar sebesar 65% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia, dan 80% dari total volume transaksi.

"Sisanya, perkiraan yang belum selesai

► Secara total, jumlah konsesi yang dimiliki JSMR yang sudah beroperasi mencapai 747 kilometer.

► JSMR menguasai pangsa pasar perusahaan jalan tol sebesar 65% dari total panjang tol yang beroperasi.

pada akhir 2019 itu ada sekitar 230 kilometer dari tol Japek Selatan [Jakarta—Cikampek Selatan] dan Probolinggo—Banyuwangi," ujarnya.

## BERUNTUN BEROPERASI

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan bahwa ruas tol Sragen—Ngawi, dan tiga ruas tol yang konsesinya dimiliki PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yakni Pejagan—Pemalang seksi 3 dan 4 (37,30 km), Pemalang—Batang segmen Sewaka—Simpang Susun (SS) Pemalang (5,40 km) dan Ciawi—Sukabumi seksi 1 Ciawi—Cigombong (15,40 km) siap untuk diresmikan.

"Sudah siap semua untuk diresmikan, menunggu waktu yang pas," kata Basuki, akhir pekan lalu.

Adapun, pada November 2018, pemerintah menargetkan dua ruas tol baru siap untuk dioperasikan, yakni tol Pemalang—Batang seksi 1 dan 2 (SS Pemalang—Batang) sepanjang 33,80 km dan Semarang—Solo seksi 4 dan 5 (Salatiga—Kartasura) sepanjang 32,50 km.

Pada bulan berikutnya, sebanyak tujuh ruas tol dengan total panjang 292,80 km siap untuk dioperasikan. Ketujuh ruas tol tersebut merupakan bagian dari ruas tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, yakni Batang—Semarang seksi 1—5 (75 km), Ngawi—Kertosono segmen Wilangan—Kertosono yang dibiayai APBN (39,10 km), Kertosono—Mojokerto seksi 4 (0,9 km).

Selain itu, ada pula relokasi Porong—Gempol [Porong—Kejaparan] sepanjang 6,30 km, Gempol—Pasuruan seksi 3 Pasuruan—Grati (12,20 km), Pasuruan—Probolinggo seksi 1—3 Grati—Probolinggo Timur (32,40 km), dan Bakauheni—Terbanggi Besar paket 1—4 sepanjang 126,90 km. □

## 3 Bulan Terakhir Bakal Bertambah 474 Kilometer

Pemerintah menargetkan sebanyak 13 ruas tol dapat beroperasi sampai akhir tahun ini dengan total panjang mencapai 473,90 kilometer. Dalam 3 tahun terakhir (2015–2017), panjang ruas tol baru yang beroperasi di Indonesia telah bertambah 332 kilometer. Sementara itu, dari Januari hingga September 2018, panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 136,10 kilometer.

## 13 Ruas Tol yang Ditargetkan Beroperasi hingga Akhir 2018

Sumber: Kementerian PUPK dan BAKOSURTANAL

Oktober	Panjang	BUJT
Pejagan—Pemalang seksi 3 dan 4 (Brebes—Pemalang)	37,30 km	PT Waskita Toll Road
Pemalang—Batang segmen Sewaka—Simpang Susun (SS) Pemalang	5,40 km	PT Waskita Toll Road
Solo—Ngawi segmen SS Sragen—Ngawi	50,90 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Ciawi—Sukabumi seksi 1 Ciawi—Cigombong	15,40 km	PT Waskita Toll Road
November		
Pemalang—Batang seksi 1 dan 2 (SS Pemalang—Batang)	33,8 km	PT Waskita Toll Road
Semarang—Solo seksi 4 dan 5 (Salatiga—Kartasura)	32,50 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Desember		
Batang—Semarang seksi 1–5	75 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Ngawi—Kertosono segmen Wilangan—Kertosono yang dibiayai APBN	39,10 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Kertosono—Mojokerto seksi 4	0,9 km	PT Astratel Nusantara
Relokasi Porong—Gempol (Porong—Kejaparan)	6,30 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Gempol—Pasuruan seksi 3 Pasuruan—Grati	12,20 km	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
Pasuruan—Probolinggo seksi 1–3 Grati—Probolinggo Timur	32,40 km	PT Waskita Toll Road
Bakauheni—Terbanggi Besar paket 1–4	126,90 km	PT Hutama Karya

## Surabaya—Sidoarjo Diusulkan Gratis

JAKARTA — Seorang anggota DPR mengusulkan pembebasan tarif jalan tol untuk sejumlah ruas menyusul penggratiskan tarif jembatan tol Surabaya—Madura atau Suramadu.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo mengatakan bahwa salah satu ruas yang bisa diubah menjadi jalan bukan tol adalah ruas Surabaya—Sidoarjo.

Dia menilai bahwa operasional jalan tol yang sudah berlangsung puluhan tahun sudah cukup memberi imbal hasil memadai bagi investor.

Setiap tahun, katanya, sebanyak 84 juta kendaraan melintas di ruas tersebut, ruas yang menjadi bagian Surabaya—Gempol sejauh 46,55

kilometer.

Data Badan Pengatur Jalan Tol menunjukkan bahwa jalan tol tersebut dibangun oleh PT Jasa Marga dan beroperasi sejak 1986.

"Misalnya, ini dibebaskan tentu membawa dampak lebih besar daripada jembatan Suramadu. Jadi, tolong dibebaskan Pak," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi V bersama empat direktor jenderal Kementerian PUPK, Senin (29/10).

Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyanto mengatakan bahwa perlakuan pembebasan tarif jembatan Suramadu tidak bisa disamakan dengan jalan tol lain. Dia menekankan bahwa jembatan Suramadu dibangun oleh

Negara, sedangkan ruas tol lain, termasuk Surabaya—Gempol dibangun oleh badan usaha.

Dia menjelaskan, posisi negara dengan badan usaha dalam perjanjian perusahaan jalan tol setara. Walhasil, negara tidak bisa serta merta membatalkan perjanjian konsesi secara sepihak.

Bila terjadi pemutusan sepihak, tuturnya, kepercayaan investor di khawatirkan juga akan menurun sehingga minat perusahaan jalan tol berkurang.

"[Menggratiskan] itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi kita harus lihat ke dalam seperti apa detailnya," jelasnya kepada *Bisnis*. (Hani Maulana)

Judul	14 PDAM Terapkan Manajemen Aset	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7		
Resume	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum memfasilitasi penerapan manajemen aset untuk 14 perusahaan daerah air minum guna menggenjot kinerja mereka.		

# 14 PDAM Terapkan Manajemen Aset

JAKARTA — Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum memfasilitasi penerapan manajemen aset untuk 14 perusahaan daerah air minum guna menggenjot kinerja mereka.

Selain bisa meningkatkan efisiensi, manajemen aset menjadi faktor kunci bagi perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk merumuskan rencana pengembangan layanan.

Sekretaris Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Muhammad Sundoro mengatakan bahwa di lapangan, banyak PDAM yang belum mengelola aset dengan baik sehingga menimbulkan kerugian.

Menurutnya, PDAM sulit mengoptimalkan aset karena identifikasi aset tidak jelas. Di samping itu, PDAM juga sukar menakar waktu yang tepat untuk melakukan pemeliharaan.

"Keputusan akan pilihan-pilihan tersebut hanya bisa terjawab dengan tepat apabila PDAM memiliki informasi yang jelas tentang aset tersebut," ujar Sundoro, Senin (29/10).

Sejalan dengan upaya perbaikan pengelolaan aset, Sundoro menyebutkan bahwa PDAM perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

BPPSPAM, katanya, saat ini telah mengembangkan sistem informasi berbentuk aplikasi manajemen aset untuk memudahkan PDAM dalam menerapkan manajemen aset.

Menurut Sundoro, manajemen aset akan menjaga nilai, kondisi, dan kinerja aset dalam tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, manajemen aset juga bisa mengurangi biaya operasional dan mencegah pemborosan akibat kesalahan kalkulasi dalam investasi baru.

Lewat manajemen aset yang mumpuni, PDAM diyakini bisa mencetak kinerja arus kas positif dan rasio keuangan yang sehat sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja pelayanan kepada pelanggan.

Saat ini, 14 PDAM yang mendapat fasilitas manajemen aset dari BPPSPAM adalah PDAM Kota Palembang, PDAM Kota Padang, PDAM Kota Payakumbuh, PDAM Kota Depok, dan PDAM Kota Bandung.

Selanjutnya, PDAM Kabupaten Indramayu, PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kota Surakarta, PDAM Kabupaten Malang, dan PDAM Kota Surabaya. Kemudian PDAM Kabupaten Bangkalan, PDAM Kota Makassar, PDAM Kabupaten Gresik, PDAM Kota Semarang.

Secara umum, BPPSPAM menargetkan jumlah PDAM berkategori sehat tahun ini bertambah 14 menjadi 223 perusahaan.

Sementara itu, PDAM berkategori kurang sehat diharapkan berkurang 6 menjadi 97 PDAM, sedangkan berkategori sakit ditargetkan turun 12 menjadi 54 PDAM. *(Rivki Maulana)*

Judul	<b>WIKA dan WSKT Menangi Lelang</b>	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya Tbk. Menjadi pemenang lelang konstruksi proyek bendungan di Jawa Tengah dengan total nilai harga penawaran yang diajukan mencapai Rp 1,82 Triliun.		

## WIKA dan WSKT Menangi Lelang

JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya Tbk. menjadi pemenang lelang konstruksi proyek bendungan di Jawa Tengah dengan total nilai harga penawaran yang diajukan mencapai Rp1,82 triliun.

Berdasarkan penjelasan pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wijaya Karya (WIKa) memenangi lelang proyek Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan harga penawaran Rp858,79 miliar atau di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) proyek senilai Rp885,70 miliar.

Dalam proyek itu, WIKa menyisihkan dua kompetitor yang sebelumnya lulus dalam tahapan prakualifikasi, yakni PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Secara total, sebanyak 172 peserta berpartisipasi dalam lelang proyek ini.

"Iya, betul, kami memenangi lelang proyek Bendungan Randugunting," kata Direktur Operasi I WIKa Agung Budi Waskito

kepada *Bisnis*, Senin (29/10).

Sementara itu, Waskita Karya (WSKT) berhasil memenangi lelang pembangunan proyek Bendungan Jlantah di Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah dengan harga penawaran Rp965,20 miliar, terkoreksi dari HPS senilai Rp996,33 miliar.

WSKT berhasil menyisihkan dua BUMN yang juga lulus prakualifikasi proyek tersebut, yakni Brantas Abipraya dan WIKa. Total partisipan dalam lelang proyek ini mencapai 80 peserta.

Bendungan Randugunting rencananya memiliki kapasitas 10,40 juta meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 1.990 hektare, serta menyediakan pasokan air baku sebesar 0,13 meter kubik per detik.

Sementara itu, Bendungan Jlantah akan memiliki kapasitas 8,30 juta meter kubik. Bendungan ini nantinya memiliki manfaat peningkatan intensitas tanam irigasi yang sudah ada seluas 805 hektare, irigasi baru 688 hektare, air baku 150 liter per detik, dan pembangkit listrik

tenaga mikrohidro 625 kilowatt.

### KONSULTAN PROYEK

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa kontrak untuk pembangunan Bendungan tersebut masih menunggu penetapan pemenang konsultansi proyek.

"Penandatanganan kontrak menunggu penetapan pemenang konsultannya," katanya.

Belum lama ini, pemerintah dan badan usaha menekan kontrak proyek tiga bendungan senilai Rp8,44 triliun yang menandai dimulainya pembangunan proyek tersebut.

Ketiga proyek bendungan tersebut yakni Tiga Dihaji di Sumatra Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Sidan di Bali. Ketiganya merupakan proyek yang baru dilelang pada awal tahun ini.

Sumiarsih menjelaskan bahwa nilai kontrak Bendungan Tiga Dihaji mencapai Rp3,82 triliun dengan kapasitas tampung 104,83 juta meter kubik. Nilai kontak Bendungan Bener senilai Rp3,79 triliun dengan kapasitas

90,39 juta meter kubik, sedangkan Bendungan Sidan mencapai Rp830 miliar dengan kapasitas 3,8 juta meter kubik.

WIKa diketahui juga memenangi pengerjaan konstruksi paket 4 untuk Bendungan Tiga Dihaji senilai Rp690,71 miliar. Pengerjaan tersebut dilakukan dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Rudy Jaya.

Adapun, WSKT juga menekan kontrak pemenang lelang pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji paket 2 dan pembangunan Bendungan Bener paket 2. Kedua proyek tersebut dilakukan dengan KSO dengan nilai kontrak pengerjaan yang didapatkan masing-masing Rp1,34 triliun dan Rp557,80 miliar secara keseluruhan.

"Dengan dimulainya pembangunan kedua bendungan ini akan dapat membantu ketersediaan air di sistem irigasi lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat setempat," kata Direktur Operasi III WSKT Fery Hendriyanto melalui siaran pers.

(Irene Agustine)

Judul	<b>Penghapusan Tarif Perlu Upaya Lanjutan</b>	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Penghapusan tarif melintas Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dinilai perlu diikuti kebijakan yang menyeluruh agar bisa mendorong perekonomian di Madura		

# Penghapusan Tarif Perlu Upaya Lanjutan

**JAKARTA, KOMPAS** — Penghapusan tarif melintas Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dinilai perlu diikuti kebijakan yang menyeluruh agar bisa mendorong perekonomian di Madura. Ada peluang pengembangan industri manufaktur ataupun pariwisata di Madura.

Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal di Jakarta, Senin (29/10/2018), berpendapat, biaya transportasi bisa ditekan melalui penghapusan tarif. Namun, agar efektif mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura, penggratisan saja tidak cukup. "Perlu dibarengi strategi menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru," ujarnya.

Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru akan menarik investasi. Dampaknya, mobilitas orang dan barang antara kedua daerah yang dihubungkan akan lebih intensif. Industri yang berpotensi dikembangkan di antaranya adalah pengolahan garam serta industri tekstil seperti batik Madura.

Selain itu, perlu pengembangan pariwisata yang dapat dipadukan dengan paket wisata yang ada di Jawa Timur. Namun, perlu integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Sejak Sabtu (27/10/2018), jembatan sepanjang 5.433 meter yang diresmikan pada 10 Juni 2009 itu resmi menjadi jalan umum nontol. Alasan utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Madura yang berkisar 16-23 persen. Pembebasan tarif tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto mengatakan, transisi pengelolaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII berlangsung sampai akhir tahun ini.

Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasi mengatakan, pemerintah masih menghitung biaya perawatan. Perkiraananya Rp 30 miliar. (NAD/CAS)

Judul	Bangunan Mesti Tahan Bencana	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 16)		
Resume	Kondisi geografis Indonesia yang dilintasi sejumlah sesar aktif dan memiliki banyak gunung berapi aktif menjadikan aspek ketahanan bangunan sebagai salah satu syarat membangun property.		

# Bangunan Mesti Tahan Bencana

*Pada bangunan low rise hingga bangunan tapak, kepastian kekuatannya menghadapi bencana dibantu tenaga yang punya sertifikat keahlian.*

**GHANI NURCAHYADI**  
gani@mediaindonesia.com

**K**ONDISI geografis Indonesia yang dilintasi sejumlah sesar aktif dan memiliki banyak gunung berapi aktif menjadikan aspek ketahanan bangunan sebagai salah satu syarat membangun property. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan para penghuni saat terjadi bencana.

Lantas bagaimana dengan ketahanan bangunan tinggi (*high rise*) yang berdiri sekarang terhadap bencana? Head of Property & Asset Management Jones Lang LaSalle Indonesia Naomi P Santosa mengatakan, pada umumnya bangunan *high rise* di Indonesia sudah memenuhi aspek ketahanan terhadap bencana.

Dalam pengerjaan pembangunan gedung, saat 80% konstruksi selesai, inspeksi biasanya dilakukan untuk melihat fungsi dasar gedung dan fitur yang sesuai dengan promosi penjualan. "Gedung tinggi di Jakarta hampir semua sudah memenuhi kriteria ketahanan terhadap bencana tersebut. Ini dapat dilihat dari *tenant*

perusahaan multinasional dalam gedung tersebut. Biasanya *tenant* tersebut punya kriteria terkait ketahanan gedung sebelum memutuskan untuk menyewa gerai," kata Naomi di Jakarta, Rabu (24/10).

Naomi mengingatkan, di samping aspek ketahanan, pengelola gedung juga mesti mempersiapkan penghuni dalam menghadapi bencana. Latihan kebencanaan secara rutin sebaiknya digelar. Bila susah melibatkan penghuni, latihan tersebut setidaknya melibatkan penanggung jawab lantai yang dapat membantu penghuni saat terjadi bencana.

"Setidaknya dengan latihan tersebut, dapat terukur pola panik penghuni sehingga dapat terselamatkan dari bencana. Intinya penghuni juga harus tahu rambu-rambu saat terjadi bencana, terutama bagi penghuni gedung *high rise*," tandas Naomi.

## Aturan teknis

Di sisi lain, Realestat Indonesia (REI) bersama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memperbarui aturan teknis bangunan agar memiliki konsep mitigasi bencana. Salah satunya, yaitu aturan mengenai spesifikasi pembangunan perumahan yang baru.

"Akhir tahun nanti diperkirakan akan terbit. Aturannya bersifat teknis saja seperti aturan mengenai kolom fondasi. Ini sudah dibahas sebelum ada kejadian gempa besar di Indonesia beberapa bulan terakhir. Tapi karena ada bencana alam tadi, prosesnya coba dipercepat," ujar Sekretaris Jenderal

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Totok Lusida kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Meskipun begitu, sejumlah aturan sejarahnya sudah menjadi pengikat bagi pengembangan dalam mendirikan bangunan. Lihat saja ada Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa Tahun 2006.

Menurut Totok, seluruh anggota REI dipastikan memenuhi aturan teknis terkait bangunan tahan gempa tersebut, baik yang diperuntukkan bagi bangunan vertikal maupun horizontal.

"Semua sudah mengikuti aturan yang berlaku. Saat gempa di Palu dan Lombok, bangunan yang didirikan anggota REI secara struktural dapat bertahan dan tidak mengalami rusak berat. Tapi kami tidak bisa berkomentar lebih jauh mengenai bangunan yang terkena fenomena likuifaksi," ujar Totok.

Untuk bangunan tinggi melebihi lima lantai (*high rise*), ketahanan terhadap gempa atau bencana alam lain masuk pengajuan penerbitan Sertifikat Layak Fungsi. Pada bangunan *low rise* hingga bangunan tapak, kepastian kekuatannya menghadapi bencana dibantu tenaga yang punya sertifikat keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. (S-4)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 30 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 16)		
Resume	Perumahan Khusus Nelayan		



ANTARA/WAHID SEPTIYWAN

**PERUMAHAN KHUSUS NELAYAN:** Perumahan khusus nelayan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) di Tungal Hilir, Tanjungabung Barat, Jambi, Minggu (28/10). Kementerian PU-Pera telah membangun sebanyak 17.844 rumah khusus di sejumlah daerah di Tanah Air sejak 2015-2017 dan ditargetkan sebanyak 4.550 unit lagi dari alokasi anggaran tahun 2018.